

Lampiran

Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2025
tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

J. DINAS KETAHANAN
PANGAN

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH 2026



KATA PENGANTAR

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan demikian program ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada adanya kebijakan dan kinerja sektor yang terkait dengan program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini memuat antara lain ; potensi, kondisi saat ini, sasaran, arah kebijakan, program serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 serta rencana indikatif pendanaannya.

Renja ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan Ketahanan Pangan ke depan, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Payakumbuh, 4 September 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



EDVIDEL ARDA, S.IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 LANDASAN HUKUM	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	13
LALU		
	2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	13
	2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	25
	2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	38
	2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	47
	2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	53
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
	3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	56
	3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	58
	3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	70
BAB IV	PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	14
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	20
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024	25
Tabel 2.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1	26
Tabel 2.5	Analisis Pencapaian Sasaran 2	27
Tabel 2.6	Hasil Pemeriksaan Sampel	31
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan Tahun 2018-2024	32
Tabel 2.8	Analisis Pencapaian Sasaran 3	32
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	34
Tabel 2.10	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	48
Tabel 2.11	Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dengan rancangan Renja SKPD Tahun 2026	54
Tabel 2.12	Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	55
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	64
Tabel 4.1	Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, di samping mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 juga memperhatikan kebijakan dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pangan Nasional dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan musrenbang serta isu-isu strategis lainnya/di bidang ketahanan pangan.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, rencana kerja senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Dengan menempati posisi lini terdepan, Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah penanggung jawab. Rencana Kerja akan menjadi bahasa implementasi setiap tahun atas Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berhasil tidaknya apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Dinas melalui Renja pada setiap Perangkat Dinas.

Perencanaan pembangunan khususnya urusan Ketahanan Pangan merupakan perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dari aspek-aspek ketahanan pangan terkait ketersediaan, konsumsi, dan distribusi pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, berdasar pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Perencanaan urusan ketahanan pangan dalam periode 2023-2026 bertitik tolak pada Rencana Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan ketahanan pangan selama 5 tahun dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 - 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2026, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan ketahanan pangan di Kota Payakumbuh.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menyusun dokumen Renja.

Sistematika dan tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Wali Kota Nomor 050.13/08/Bappeda-Ko/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;)
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
 14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
 18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, tambahan lembaran daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu:

1. Menjabarkan RKPD dengan berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan menyelaraskan dokumen perencanaan dengan usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a) Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis dan operasional Dinas Ketahanan Pangan.
- b) Sebagai acuan dalam mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja.
- c) Menjabarkan rencana strategis dalam rencana jangka pendek (1 tahun).
- d) Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu..
- e) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

- f) Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada Tahun 2026.
- g) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturannya lainnya yang mengatur tentang tugas, fungsi dan uraian tugas serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, atau Program dan Kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Bab ini memaparkan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan maupun mengenai ketersediaan anggaran, selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.770.142.396,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.128.783.021,- atau 82,99%. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dari 5 indikator kinerja, 4 (empat) indikator kinerja telah memenuhi target dan termasuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil. Hanya satu indikator yang tidak mencapai target sasaran. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas anggaran yang ada terhadap capaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Adapun rincian realisasi anggaran per program kegiatan tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

NO.	Uraian Program dan Kegiatan	Fisik				Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	85,5	85,6	100,12%	2.823.112.754	2.238.770.960	79,30
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	85%	100%	30.376.000	26.587.875	87,53
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	22.690.050	20.251.350	89,25
	b. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6 laporan	6 laporan	100	7.685.950	6.336.525	82,44
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	83%	92%	2.260.784.156	1.708.769.970	75,58
	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	14orang	77,78%	2.142.158.906	1.590.771.170	74,26
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	12 dok	100%	110.208.000	110.208.000	100,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp8.417.250	Rp7.790.800	92,56
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	10.090.850	9.703.125	96,16
	a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	10.090.850	9.703.125	96,16
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum sesuai standar	85%	85%	100%	277.805.900	268.102.997	96,51
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	100%	1.611.000	1.316.000	81,69
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	25.150.000	20.500.000	81,51
	c. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	52 paket	52 paket	100%	16.254.150	13.555.900	83,40
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	100%	13.846.450	12.581.675	90,87
	e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	100%	8.390.400	8.352.000	99,54

NO.	Uraian Program dan Kegiatan	Fisik				Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	5 laporan	100%	4.999.900	4.262.850	85,26
g.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100%	207.554.000	207.534.572	99,99
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85%	85%	100,00%	11.960.000	11.200.000	93,65
a.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	100,00%	11.960.000	11.200.000	93,65
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	85%	100%	105.555.848	95.735.717	90,70
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	2.300.000	2.000.000	86,96
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 laporan	2 laporan	100%	30.770.000	21.269.680	69,12
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 orang	2 orang	100%	72.485.848	72.466.037	99,97
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	85%	100%	126.540.000	118.671.276	93,78
a.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%	39.190.000	33.871.000	86,43
b.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	10 unit	100%	78.800.000	77.030.276	97,75
c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	100%	8.550.000	7.770.000	90,88
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+Pemda)	52%	73,20%	140,77%	8.012.400	7.283.450	90,90
1.	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase cadangan pangan masyarakat	16%	16,77%	104,81%	8.012.400	7.283.450	90,90
a.	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	2 laporan	2 laporan	100%	8.012.400	7.283.450	90,90

NO.	Uraian Program dan Kegiatan	Fisik				Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
II.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	61,5%	68,75%	111,79%	614.449.292	571.821.411	93,06
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan kasus pangan	57,5%	70,65%	122,87%			
1.	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan	16,00%	20,00%	125,00%	115.740.392	105.818.437	91,43
		Persentase informasi harga yang up to date	100%	100%	100%			
a.	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	1 unit	1 unit	100%	499.900	446.575	89,33
b.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	80 keluarga	80 keluarga	100%	67.831.800	60.713.350	89,51
c.	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	100%	499.900	446.575	89,33
d.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	16.851.100	15.304.700	90,82
e.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen	100%	4.530.500	3.915.700	86,43
f.	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100%	25.527.192	24.991.537	97,90
2.	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	64,00%	145,66%	227,59%	62.543.200	50.525.449	80,78
a.	Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota yang diadakan	2,4 ton	2,4 ton	100%	44.622.100	34.807.024	78,00
b.	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2,4 ton	2,4 ton	100%	17.921.100	15.718.425	87,71

NO.	Uraian Program dan Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
3.	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan	43%	68,09%	158,35%	436.165.700	415.477.525	95,26
		Persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	21%	29,79%	141,86%			
a.	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dok	1 dok	100%	4.255.900	3.891.475	91,44
b.	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	1 laporan	100%	360.532.550	342.258.000	94,93
c.	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 laporan	1 laporan	100%	71.377.250	69.328.050	97,13
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	89,1	89,17	100,08%	247.066.000	239.040.975	96,75
1.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	50%	100%	74.729.500	72.546.675	97,08
a.	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	100%	74.729.500	72.546.675	97,08

NO.	Uraian Program dan Kegiatan	Fisik				Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2.	Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	18%	18%	100,00%	172.336.500	166.494.300	96,61
a.	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	100%	4.205.850	3.922.200	93,26
b.	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	168.130.650	162.572.100	96,69
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	78,00%	86,67%	47.019.750	44.627.300	94,91
1.	Kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	18%	72,00%	400,00%	47.019.750	44.627.300	95
a.	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota yang dibina	1 dok	1 dok	100%	47.019.750	44.627.300	94,91
b.	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	30.482.200	27.238.925	89,36
						3.770.142.396	3.128.783.021	82,99

Sumber : DKP, 2025

Dari 5 (lima) program yang dikerjakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, 14 (empat belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan terdapat 3 sub kegiatan dengan peyerapan anggaran rendah dibawah 80% yaitu:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan target 18 orang dan terealisasi sebanyak 14 orang. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.142.158.906,- terealisasi sebesar Rp. 1.590.771.170,- atau 74,26%. Realisasi ini termasuk rendah karena anggaran disediakan untuk 18 orang, sedangkan yang terealisasi untuk 14 orang disebabkan ada pegawai yang pensiun dan pindah.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sub kegiatan ini berupa pembayaran rekening rekening listrik dan indihome dengan target 2 laporan, dan terealisasi sebanyak 2 laporann. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.269.680,- atau 69,12%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena perhitungan awal alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini disiapkan dengan alokasi maksimal sesuai dengan peruntukan dan standar biaya namun dalam pelaksanaannya realisasi anggaran dilakukan sesuai dengan belanja.
3. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini berupa pembelian cadangan pangan berupa beras yang dititipkan di Perum Bulog Kantor Cabang Bukittinggi Jl. Perwira no. 182 Kota Bukittinggi dengan target sebanyak 2,4 ton dan terealisasi 2,4 ton dengan capaian 100%, Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.622.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.807.024,- atau 78%. Realisasi keuangan rendah karena pengadaan cadangan pangan menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh Perum Bulog.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan disajikan dalam Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 Kota Payakumbuh.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.3	PANGAN									
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86,5	85,60	85,5	85,6	100,11	86	86	99,42
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85	85,00	85,00	85,00	100,00	85	85,00	100,00
2 09 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	3,00	3,00	3,00	100,00	3	9,00	75,00
2 09 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24	7,00	6,00	6,00	100,00	6	19,00	79,17
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90	90	90,00	82	91,11	90	90,00	100,00
2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	23	15,00	15	100	17	55	68,75
2 09 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	-	12,00	12	100	12	24	50,00
2 09 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/trivulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/trivulan/semesteran SKPD	48	3	12	12	100	-	15	31,25

2 09' 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85	85	85,00	85	100	85	85	100,00
2 09' 01 2.08 0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	1	1	1	100	-	2	50,00
2 09' 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	1	2,00	2	100	1	4	50,00
2 09' 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	1	1,00	1	100	1	3	75,00
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85	85	85,00	85	100	85	85	100,00
2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	2	1,00	1	100	1	4	100,00
2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	10	10,00	10	100	10	30	75,00
2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	11	2	2	100	3	16	177,78
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)	54	50,60	40,00	41,06	102,00	53	53,00	98,15
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%cadangan pangan masyarakat	18	14	54,00	73,20	135,5	17	17	94,44
2 09 02 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	8	-	2,00	2	100	2	4	50,00
2 09 02 2.01 0006	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	15	-	-	-	-	-	-	-
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE	62,50	96,3	60,00	68,75	114,00	62,00	62,00	99,20
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	58,50	70,65	50,00	55,55	111,00	58,00	58,00	99,15

2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Persentase Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan	19	20	17	17	100	18	18	94,74
		Persentase informasi harga yang up to date	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2 09 03 2.01 0002	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	4	-	-	-	-	-	-	-
2 09 03 2.01 0006	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan	5	1	1	1	100	-	2	40,00
2 09 03 2.01 0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	400	-	100	100	100	30	130	32,50
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	10	1	-	-	-	-	1	10,00
09 03 2.01 0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	5	5	100,00
2 09 03 2.01 0010	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kab/Kota	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	8	2	2	2	100	-	4	50,00
	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	8	1	1	1	100	-	2	25,00
2 09 03 2.01 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	jumlah laporan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota	3	-	-	-	-	-	-	-
2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah dokumen pemantauan harga dan pasokan pangan	3	-	-	-	-	-	-	-
2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	jumlah laporan neraca bahan makanan	3	-	1	1	100	1	2	66,67
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM	66	62,12	61,5	61,5	100,00	64	64,00	96,97
2 09 03 2.02 0003	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	16	1	3	3	100	1,50	5,50	
2 09 03 2.02 0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang dikelola		-	3	3	100	39,96	43	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	12	-	-	-	-	-	-	-

2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan	45,00	47,00	68,75	68,75	100,00	44,00	44,00	97,78
		persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	23,00	23,00	20,00	29,79	148,95	22,00	22,00	95,65
2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	4	1	1	1	100	1	3	75,00
2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4	1	1	1	100	1	3	75,00
2 09 03 2.04 0003	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	4	1	1	1	100	-	2	50,00
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	89,30	89,02	89,10	89,17	100,07	89	89	99,66
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	20	20	18	18	100	18	18	90,00
2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	-	2	50,00
2 09 04 2.02 0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	8	1	1	1	100	-	2	25,00
09 04 2.02 0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	-	1	1	100	1	1	

2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50	50	50	50	100	50	50	100,00
2 09 04 2.01 0001	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	4	1	1	1	100	1	3	75,00
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00	90	90	80	89	90	90	100,00
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	20	15	40	40	100	19	19	95,00
2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	1	3	75,00
2 09 05 2.01 0009	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	1	3	75,00

Sumber : DKP, 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode Tahun 2023-2026, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	19.745	19.780	100,22
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85,20	87,7	102,93
3	Tingkat Keamanan pangan	Level	Tinggi	Sedang	86,66
4	Stabilitas Harga				
	a. Beras	%	≤10	1,63	183,7
	b. Cabe	%	≤25	20,69	117,24

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	c. Bawang	%	≤25	13,40	146,4
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100

Sumber : DKP, 2025

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		%	Capaian Tahun 2024		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	19.735	22.662	114,42	19.745	19.780	100,22	Sangat baik	19.765	100,07

Sumber : DKP, 2025

Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dilihat dari indikator : ketersediaan pangan utama.



Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan utama adalah sebesar 19.780 ton dari target sebesar 19.745 ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,22 % dengan kategori

sangat baik. Capaian ini turun dari capaian tahun sebelumnya sebanyak 14,2 Point.

Pangan merupakan kebutuhan esensial dan komoditas paling strategis dalam kehidupan manusia. Penyediaan pangan untuk konsumsi harus memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Salah satu masalah ketersediaan pangan adalah untuk mengetahui apakah penyediaan pangan yang ada mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Untuk itu perlu dipahami situasi pangan disuatu daerah dalam periode tertentu, selanjutnya diupayakan strategi untuk mencapai ketahanan pangan.

Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang
beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		%	Capaian Tahun 2024		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Konsumsi	%	85,10	87,3	102,58	85,20	87,7	102,93	Sangat baik	85,40	102,69
2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	100	tinggi	sedang	86,66	sedang	Tinggi	86,66

Sumber : DKP, 2025

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Kemanan Pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Penganekaragaman konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan gizi seimbang di Indonesia. Hal ini diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH), yang mencerminkan kualitas konsumsi pangan dan kecukupan gizi masyarakat. Dalam RPJMN 2025-2029 pencapaian skor PPH sendiri menjadi indikator penting yang dipantau secara konsisten dari tahun ke tahun.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada

tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan memepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Apabila keragaman konsumsi pangan dibawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pangan dan gizi, peningkatan ketersediaan, serta pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakkan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi

Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

Setelah dilakukan penghitungan PPH Konsumsi dengan Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein 57 gr/kapita/hr didapat nilai PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar 87,7 dengan capaian kinerja 102,58% termasuk kategori sangat baik.

A. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun

2006 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Dalam rangka pengawasan keamanan pangan di Kota Payakumbuh dilakukan pengujian terhadap sampel pangan segar. Sampel diambil di pasar Ibh Payakumbuh. Uji yang dilakukan adalah pengujian terhadap kandungan pestisida dan formalin.

Pengujian sampel dilakukan terhadap 50 sampel pangan segar diantaranya pangan segar asal tumbuhan sayur-sayuran dan beras. Pemeriksaan sampel dilakukan sebanyak 3 kali, yakni 2 kali uji residu pestisida dan 1 kali uji logam. Dari pemeriksaan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 2-6
Hasil Pemeriksaan Sampel

No	Pemeriksaan Yang Dilakukan	Jumlah sampel diperiksa	Hasil Analisa Yang Tidak Aman	% sampel makanan yang aman dikonsumsi	Ket
1.	Residu pestisida	20	0 komoditi	100%	tinggi
2.	Logam berat	30	11 komoditi	63,3 %	cukup
Tingkat Keamanan Pangan				78 %	Sedang

Sumber : DKP, 2025

Keterangan Level Tingkat Keamanan :
0 -60 % : Tidak Aman

61 – 75 % : Cukup
 76 – 85 % : sedang
 86 – 100 % : Tinggi

Jika diperhatikan perkembangan capaian Tingkat Keamanan Pangan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Tingkat Keamanan Pangan pada Tahun 2018 tercapai 100% dari target level sedang, begitu juga dari Tahun 2019- 2024 terealisasi 100%. Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Pangan dari Tahun 2018-2024, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2-7
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan
Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

Sumber : DKP, 2025

Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2-8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		%	Capaian Tahun 2024		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Stabilitas Harga										

	* beras	%	≤10	3,93	160,7	≤10	1,63	183,7	Sangat baik	10	183,7
	* cabe	%	≤25	18,68	125,28	≤25	20,69	117,24	Sangat baik	25	117,24
	* bawang	%	≤25	15,87	136,52	≤25	13,40	146,4	Sangat baik	25	146,4
	Rata-rata Capaian Kinerja		≤10		140,83	≤10		149,11	Sangat baik		149,11

Sumber : DKP, 2025

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dilihat dari indikator : Stabilitas Harga Beras, Stabilitas Harga Cabe, dan Stabilitas Harga Bawang dengan rata-rata capaian kinerja 149,11% kategori sangat baik

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Beras adalah sebesar 1,63 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 183,7 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Cabe adalah sebesar 20,69 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 117,24% dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini sedikit mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Bawang adalah sebesar 13,40 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 146,4 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh

No.	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025 (tw 2)	2026	2027	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	15	16	17
1.	Ketersediaan Pangan Utama			19.745	19.785	19.790	19.795	19.780	19.780	19.790	19.795	Penyediaan pangan yang di ukur menggunakan salah satu instrumen yang ada pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (Food Supply)
2.	Skor PPH Konsumsi			85,2	-	-	-	87,7	-	-	-	Dapat mengetahui pola konsumsi masyarakat yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu
	PoU (Prevalence of Undernourishment)			-	5,81	5,54	5,23	8,17	-	5,54	5,23	Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya
3.	Tingkat Keamanan Pangan			tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	Untuk mengetahui kondisi pangan segar yang kemungkinan ada cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia

No.	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025 (tw 2)	2026	2027	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	15	16	17
4.	Stabilitas Harga											
	- beras			≤'10	≤'10	≤'10	≤'10	1,63%	1,43%	≤'10	≤'10	Data dan informasi harga beras yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	- cabe			≤25	≤25	≤25	≤25	20,69%	12,84%	≤25	≤25	Data dan informasi harga cabe yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	- bawang			≤25	≤25	≤25	≤25	13,40%	14,57%	≤25	≤25	Data dan informasi harga bawang yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
5	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat			80,00	80,80	80,85	80,90	80,75	80,05	80,85	80,90	sebuah skor atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mereka, yang berkisar dari AA (Sangat Memuaskan) hingga D (Sangat Kurang). Predikat ini menunjukkan seberapa baik instansi tersebut dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya,
6.	Persentase cadangan pangan		IKK	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	145,66	Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kota

Sumber : DKP, 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi Tahun 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yaitu :

1. Masih kurangnya ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh faktor produksi dan distribusi (ekspor-impor) dan produksi saat ini sangat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, kelancaran air (perbaikan irigasi) dan hama yang dialami.
2. Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat disebabkan kebiasaan pola makan masyarakat yang belum beragam dan berimbang.
3. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
4. Pemanfaatan pangan lokal di Kota Payakumbuh masih dominan sebagai makanan pendamping, belum bisa sebagai substitusi pangan / makanan pengganti pokok berupa beras dan terigu.
5. Belum berkembangnya industri pangan lokal di Kota Payakumbuh.
6. Meningkatnya harga input/sarana produksi dan ketersediaan pangan setempat.
7. Pengaruh faktor distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang.
8. Sepanjang tahun relatif kondisi angka surplus beras di Sumatera Barat tidak menjamin terhadap kondisi stabilitas ketersediaan dan harga karena sistem distribusi yang tidak

merata serta akibat ulah pedagang yang memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan.

9. Banyaknya cabe merah yang dipasok keluar Sumbar yang dibawa oleh pedagang, terutama ke Provinsi Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu dan Sumut, dan hal ini mengakibatkan sering terganggunya/kurangnya ketersediaan di daerah produksi.
10. Sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk komoditi bahan pangan belum sepenuhnya dibenahi terutama oleh para pengambil kebijakan. Adanya mekanisme pasar yang tidak normal serta adanya pihak-pihak yang memainkan harga pangan di pasaran mengakibatkan gejolak harga pangan di masyarakat.

Adapun langkah-langkah perbaikan dan antisipasi untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan evaluasi time schedule kegiatan sehingga lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan sesuai kondisi yang ada.
3. Perlu adanya Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam melaksanakan edukasi / sosialisasi ke masyarakat.
4. Sangat diperlukan pengembangan SDM pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan manajemen usaha, kewirusahaan dan strategi bisnis pengolahan pangan lokal.
5. Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok binaan/UKM sebaiknya dipromosikan melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya menu/snack yang disediakan adalah pangan lokal.

6. Jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan stakeholder dan off taker terkait harus ditingkatkan untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan.
7. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
8. Monitoring harga dan pasokan yang dilakukan secara kontiniu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena:
 - 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;

- 3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
 - 4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
 - 5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - 6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan;
 - 7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
 - 8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;
 - 9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta
 - 10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.
 - c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
 - d. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan,

potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.

- e. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
- g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian
- h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
- i. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu

kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidاكلancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena di samping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi,

baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;

- 1) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 2) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam

pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;

- 4) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 5) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
- b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan
- d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah

penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;
- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;
- e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Retail Practices (GRP);
- f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
- g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;

- j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan pangan Kota Payakumbuh selain memiliki faktor pendukung juga menghadapi berbagai hambatan baik dari internal organisasi maupun faktor eksternal. Untuk itu dilakukan analisis SWOT sebagai Langkah dalam mengevaluasi kekuatan (**S**trength), kelemahan (**W**eakness), peluang (**O**pportunity) dan ancaman (**T**hreats) untuk menentukan strategi dan arah kebijakan organisasi serta melakukan perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan.

A. Kekuatan (Strength)

1. Struktur Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Proses Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan telah berjalan baik;
3. Koordinasi dengan stakeholder terkait telah terjalin dengan baik;
4. SOP kegiatan telah tersusun;
5. Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas cukup memadai.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis kurang memadai;
2. Koordinasi internal terkait pelaksanaan kegiatan kurang optimal;
3. Internalisasi SOP dan Budaya Kerja organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang kurang optimal.

C. Peluang (Opportunity)

1. Regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendukung;
2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait yang baik;
3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak ketiga (akademisi, Bulog);
4. Berkembangnya teknologi baik teknologi pertanian maupun pengolahan hasil pertanian.

D. Ancaman (Threats)

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi, yang mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian yang semakin sempit;
2. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian;
3. Perubahan dampak iklim yang bisa kegagalan panen;
4. Pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan;
5. Masih ditemukannya usaha pengolahan pangan yang menggunakan bahan tambahan (zat aditif) yang berbahaya bagi kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD mengakomodir Program Kegiatan yang sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Dari Rancangan awal tersebut, masih banyak yang belum terakomodir kebutuhan Dinas, di sisi lain ada kegiatan yang dirasa tidak memerlukan dana yang besar tapi dialokasikan dengan dana yang cukup besar begitu juga sebaliknya. Untuk itu telah dilakukan review kembali dengan menambahkan catatan penting yang dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.383.291.328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.962.483.078	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	86,5	2.934.509.489	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	86,5	2.992.709.489	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	64.932.650	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	64.932.650	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	22.390.500	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	22.390.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	42.542.150	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	42.542.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	82%	2.107.101.853	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.107.101.853	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 org	2.013.763.957	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 org	2.013.763.957	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	53.337.896	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	53.337.896	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	34.183.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	34.183.800	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35 paket	23.011.500	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35 paket	23.011.500	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 dok	11.172.300	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 dok	11.172.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum sesuai standar	85%	197.374.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum sesuai standar	85%	228.374.250	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	1.608.750	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	1.608.750	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Pembelian mesin pencacah kertas

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	16000000	Pembelian kamera dan kelengkapannya
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	34 paket	16.209.300	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	34 paket	16.209.300	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8.251.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8.251.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket	8.390.400	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket	8.390.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5.265.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5.265.800	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		~Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	157.649.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		~Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	157.649.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	210.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	220.000.000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	210.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	210.000.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	10.000.000	Pembelian scanner
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	169.766.936	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	169.766.936	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	33.766.936	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	33.766.936	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	136.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	136.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	151.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	168.350.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.190.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42.950.000	Disesuaikan dengan SSH

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	102.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	116.240.000	Disesuaikan dengan SSH
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	9.160.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	9.160.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	- 62,5 % - 58,5%	281.364.250	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	- 62,5 % - 58,5%	667.255.750	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan		- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 13% - 100%	111.500.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan		- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 13% - 100%	396.500.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	50.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200 keluarga	200.000.000	bantuan pangan untuk kasus stunting
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota		Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota	2 laporan	50.000.000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota		Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota	3 laporan	185.000.000	Penambahan untuk Gerakan Pangan Murah
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	7.500.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	7.500.000	
	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	4.000.000	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	4.000.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 45% - 23%	169.864.250	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 45% - 23%	270.755.750	
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dok	20.755.750	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dok	20.755.750	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1Laporan	149.108.500	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1Laporan	250.000.000	Penambahan untuk bantuan bibit KWT
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Skor PPH Ketersediaan	89,30	97.233.739	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Skor PPH Ketersediaan	89,30	202.233.739	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	- 20%	80.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	- 20%	185.000.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000	Penambahan anggaran untuk pembelian sarana prasarana dalam penyaluran cadangan pangan
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	150.000.000	Penambahan jumlah KK yang diintervensi menjadi 200 KK, intervensi berupa bantuan ayam kampung/itik
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	17.233.739	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	17.233.739	
	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 dok	17.233.739	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 dok	17.233.739	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	70.183.850	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	100.284.100	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	- 20%	70.183.850	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	- 20%	100.284.100	
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	39.899.750	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	70.000.000	Penambahan untuk uji sampel
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.284.100	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.284.100	

Sumber : DKP, 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan untuk Dinas Ketahanan Pangan tidak ada usulan yang masuk di e-musrenbang.

Usulan melalui Pokok Pikiran atau dari Pemangku Kepentingan juga tidak ada. Usulan untuk program kegiatan masyarakat dapat disalurkan melalui musrenbang maupun DPRD melalui pokir atau aspirasi yang semuanya diinputkan kedalam menu aspirasi masyarakat yang ada di SIPD. Dari usulan masyarakat yang telah diinputkan ke SIPD baik melalui musrenbang maupun pokir DPRD tidak ada satupun usulan untuk Tahun 2026 yang ditujukan untuk Dinas Ketahanan Pangan.

Selain itu dalam hal perencanaan Dinas Ketahanan Pangan juga melaksanakan Forum Perangkat daerah yang mengundang pihak terkait untuk memaparkan program kegiatan dinas untuk tahun 2026, namun dari pihak terkait pada waktu forum perangkat daerah tersebut juga tidak ada menyampaikan usulan yang perlu dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan untuk tahun 2026 dan setuju dengan paparan terkait program dan kegiatan yang telah disampaikan pada forum tersebut. Pada dasarnya para stakeholder mendukung setiap Program Kegiatan yang dilakukan Dinas apabila dialokasikan untuk mereka.

Tabel 2.11

Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 Dengan Rancangan Renja SKPD Tahun 2026

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025					Kegiatan sesuai Renja SKPD Tahun 2026		
NO	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kel)	Indikator Kinerja	Vol	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL						

Sumber : DKP, 2025

Tabel 2.12

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

NO	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Kel)	Indikator Kinerja	Besaran / Vol	Catatan
1	2	3	4	5	8
	NIHIL				

Sumber : DKP, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja Dinas Ketahanan Pangan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJMN 2025-2029 , maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2029 dan RKPD Kota Payakumbuh 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 bidang Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Badan Pangan Nasional berkontribusi pada upaya mewujudkan kemandirian pangan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional ke-2 (PN2) yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pencapaian PN2 didukung oleh Program Prioritas (PP) yaitu Swasembada Pangan dan Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular. Badan Pangan Nasional juga berkontribusi pada PN5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah Dalam Negeri melalui PP Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global dan PN7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan melalui PP Pengendalian Inflasi.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu : 1) Kementerian Perdagangan terkait 2 penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan; 2) Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga; serta 3) Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 bahwa Indonesia menuju swasembada pangan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Sehingga, untuk mengatasi isu-isu pangan tersebut, pemerintah, sektor swasta dan

masyarakat perlu bekerjasama dan diperlukan strategis lintas sektor untuk mempertahankan produksi pangan dan membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pangan Nasional fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Tahun 2025 Badan Pangan Nasional berupaya untuk memantapkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan, meningkatkan penjaminan keamanan pangan, dan mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi pada RPJMD yang terkait langsung tupoksi dan kewenangan dinas serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun .

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan
3. Mewujudkan stabilisasi harga pangan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Khusus untuk periode RPJMD dan Renstra ini program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kedepannya nomenklatur program dan kegiatan untuk sestiap urusan pemerintahan akan seragam di seluruh Indonesia. Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang ada.

Penjabaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tergambar sebagaimana Tabel Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 (terlampir).

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target Capaian Program : Nilai IKM 86,5

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - c. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah
 - d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Fasilitasi kunjungan tamu
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- A. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Target Capaian Program : Skor Pola Pangan Harapan
87,9

Kegiatan :

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - b. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota
Penyediaan informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota
 - c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - d. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/tahun
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal

B. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Target Capaian Program : Persentase daerah rentan pangan 11%

Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - c. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota

C. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Target Capaian Program : Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan 85,1%

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota
 - b. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Payakumbuh

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PANGAN				3.157.251.426	DAU			3.808.007.708
	DINAS KETAHANAN PANGAN				3.157.251.426				3.808.007.708
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Payakumbuh		2.688.902.606				3.091.640.408
2.09.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai IKM		86,5	59.734.300	DAU		87	97.856.000
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dok	21.877.250	DAU		3 dok	28.170.050
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 dok	37.052.050	DAU		6 dok	67.685.950
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah		1 dok	402.500	DAU		1 dok	1.000.000
2.09.01.2.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkann dan diperiksa lingkup perangkat daerah		1 dok	402.500			1 dok	1.000.000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas		82%	2.239.712.950	DAU		85%	2.362.235.116
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		17 org	2.034.632.950	DAU		17 org	2.157.155.116
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dok	205.080.000	DAU		12 dok	205.080.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian		100%	23.276.600	DAU		100%	60.550.000
2.09.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		22 paket	22.226.600	DAU		38 paket	35.000.000
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja		1 dok	1.050.000	DAU		1 dok	25.550.000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum sesuai standar		85%	173.795.260	DAU		85%	241.680.350
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		7 jenis	1.649.000	DAU		8 jenis	1.900.000
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		37 paket	18.028.660	DAU		38 jenis	18.526.000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		5 paket	8.271.100	DAU		4 paket	9.862.150
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 paket	8.070.000	DAU		2 paket	8.392.200
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		5 laporan	2.415.000	DAU		5 laporan	7.000.000
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		90 laporan	134.959.000	DAU		100 laporan	195.000.000
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1 dok	402.500	DAU		100 laporan	1.000.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar		85%	67.103.496	DAU		85%	140.821.192
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	28.084.200	DAU		2 laporan	40.500.000
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 Laporan	39.019.296	DAU		1 Laporan	100.321.192
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		85%	125.280.000	DAU		85%	188.497.750
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 unit	39.190.000			1 unit	39.190.000
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		10 unit	78.800.000	DAU		10 unit	140.000.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 paket	7.290.000	DAU		3 paket	9.307.750
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan kases pangan		- 62,5 % - 58,5%	364.645.445	DAU		- 62,5 % - 58,5%	581.367.300
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date		- 19% - 100%	154.632.950	DAU		- 19% - 100%	220.000.000
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		40 keluarga	50.816.500	DAU		40 keluarga	65.000.000
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota		1 laporan	98.142.550	DAU		5 kegiatan	120.000.000
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 dokumen	2.923.950	DAU		1 dokumen	25.000.000
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		1 dokumen	2.749.950	DAU		1 dokumen	10.000.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non		- 45% - 23%	210.012.495	DAU		- 45% - 23%	361.367.300
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 dok	4.255.450	DAU		3 kali	36.124.850
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekekargaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		1 Laporan	205.757.045	DAU		- 44% - 22%	220.242.450
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan		89,30	52.714.900	DAU		89,3	35.000.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait		50%	2.838.000	DAU		50%	35.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan		1 dok	2.838.000	DAU		1 dok	35.000.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan		- 20%	49.876.900	DAU		20%	115.000.000
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	12.600.600	DAU		1 dokumen	30.000.000
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi		1 dokumen	33.205.250	DAU		1 dokumen	60.000.000
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota	jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi		1 dokumen	4.071.050	DAU		1 dokumen	25.000.000
2.9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		90%	50.988.475			90%	100.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan		- 20%	50.988.475			- 20%	100.000.000
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	21.022.600			1 dokumen	45.000.000
2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		1 dokumen	29.965.875			1 dokumen	55.000.000

Sumber : DKP, 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

4.1. Rencana Kerja

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2026 sesuai dengan tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah 1 (satu) Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ditambah 3 (tiga) program yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.**

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi,

konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi dan pasokan harga pangan**

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan upaya ketahanan pangan keluarga dengan memberikan bantuan jamur yang bernilai ekonomi. Selain itu sub kegiatan ini juga memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait peningkatan ketahanan pangan keluarga sehingga dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang arti penting ketahanan pangan untuk 40 KK.
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota
Sub kegiatan ini memantau harga pangan masyarakat sebanyak 365 hari, memantau stok pangan dan pasokan sebanyak 52 kali.

Sasaran Pemanfaatan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat memantau harga pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen

3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NMB) merupakan alat untuk menyusun kebijakan perencanaan pangan yaitu mengukur ketersediaan energi masyarakat yang ditetapkan secara detil sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari. Selain itu NBM ini juga bermanfaat untuk evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan pangan, membuat perencanaan produksi/pengadaan pangan dan dijadikan bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi.

4. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota

Penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah kabupaten/kota merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam periode waktu tertentu.

Tujuan penyusunan proyeksi neraca pangan:

- Memberikan informasi perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan di masa mendatang
- Dasar untuk merencanakan kebutuhan produksi, ekspor, impor, dan stok/cadangan pangan
- Membantu pembuat keputusan dalam membuat program dan kebijakan untuk memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi pangan di wilayah

Kegiatan :

2. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun

Sub kegiatan ini melakukan penghitungan skor PPH Konsumsi yang berdasarkan kepada Data Primer SUSENAS. Adapun tujuannya adalah untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Melalui kegiatan ini dilakukan beberapa upaya diversifikasi pangan, dimulai dari pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan saja, sampai dengan aspek pengolahan, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi antara lain pelatihan pangan local non beras non terigu, sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, sosialisasi konsumsi pangan local, dan Lomba Pengolahan Pangan di Tingkat Kota dan Provinsi sebagai upaya untuk pengembangan sumberdaya masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Program Penanganan Kerawanan Pangan :

Kegiatan :

1. Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini berupa persiapan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Kegiatan ini bertujuan menyediakan pangan dalam bentuk sembako sebagai intervensi bagi penduduk rawan pangan yang termasuk dalam wilayah rentan pangan tinggi dan rentan pangan sedang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh untuk 100 KK.
3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota
Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system dalam penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pangan dan gizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan tentang pentingnya penyediaan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk keperluan perencanaan dan evaluasi program sekaligus sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah rawan Pangan dan Gizi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), bahwa penyelenggaraan SKPG menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, yang selanjutnya akan menjadi bahan informasi daerah terkait situasi kewaspadaan pangan dan gizi di wilayahnya, yang disusun secara periodic oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Sub kegiatan ini berisi pembuatan laporan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)

Kegiatan :

2. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan

Sub kegiatan ini berisi pembuatan laporan FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)

FSVA menyediakan informasi bagi pengambil keputusan sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi dan upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. Penyusunan FSVA Kabupaten/kota merupakan upaya untuk mempertajam analisis FSVA Nasional dan Provinsi sehingga permasalahan pangan, kemiskinan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini melakukan uji sampel terhadap pangan segar dan melakukan sosialisasi keamanan pangan segar. Tujuan sub kegiatan ini untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri dan lain-lain. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh.

2. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini melakukan sosialisasi pangan segar bersertifikasi dan kepada pelaku usaha, peserta didik, dan masyarakat. Tujuan dari sub kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan dan pangan bersertifikasi.

4.2 Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2026 yang dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh, merupakan program prioritas Kota Payakumbuh, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sebesar Rp. 3.157.251.426,- Dengan rincian sebagaimana pada Tabel lampiran ini

Tabel 4.1

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KETAHANAN PANGAN						3.157.251.426,00							3.749.123.908,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.157.251.426,00								3.749.123.908,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.157.251.426,00								3.749.123.908,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	-			86.5 Nilai	2.688.902.606,00						-	3.022.756.608,00		
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	82.25 88.5	80.75 85.6	80.95 86	81 86.5	2.688.902.606,00	-	-	-	-	-	-	3.022.756.608,00	-	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	-			85 %	59.734.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	97.856.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	21.877.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		28.170.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	37.052.050,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		67.685.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	-	-	-	-	-	2.688.902.606,00	-	-	-	-	-	-	3.022.756.608,00	-
	2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	402.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	402.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	82.25 88.5	80.75 85.6	80.95 86	81 86.5	2.688.902.606,00	-	-	-	-	-	-	3.022.756.608,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas</i>	-			85 %	2.239.712.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	2.293.851.118,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/bulan	2.034.632.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		2.157.155.118,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	205.080.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		136.890.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jayanan kepegawaian</i>	-			100 %	23.276.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	60.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				22 Paket	22.226.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	1.050.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		25.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar	-			85 %	173.795.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	241.680.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.649.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				37 Paket	18.028.860,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		18.526.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	8.271.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		9.862.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	8.070.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		8.392.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				5 Laporan	2.415.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	134.959.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	-	-	-	-	-	2.688.902.606,00	-	-	-	-	-	-	3.022.756.608,00	-
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	402.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	82.25 88.5	80.75 85.6	80.95 86	81 86.5	2.688.902.606,00	-	-	-	-	-	-	3.022.756.608,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar</i>	-			85 %	67.103.496,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	-	-	140.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	28.084.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	39.019.296,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	-		100.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik</i>	-			85 %	125.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	188.497.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	39.190.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		39.190.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	78.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	7.290.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		9.307.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	-			87.9 Nilai	364.645.445,00						-	476.367.300,00	
		[Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan	88.3	87.7	85.3	87.9	364.645.445,00	-	-	-	-	-	-	476.367.300,00	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. <i>Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan</i> 2. <i>Persentase Informasi Harga yang Up to Date</i>	-			19 % 100 %	154.632.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				40 Keluarga	50.816.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>				1 laporan	98.142.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	2.923.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningka tan Pereko nomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
			<i>Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	2.749.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningka tan Pereko nomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. <i>Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan</i> 2. <i>Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Tengku</i>	-			45 % 23 %	210.012.495,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sambada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	256.367.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>				1 Dokumen	4.255.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sambada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		36.124.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Laporan	205.757.045,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan . Terampil dan Berdaya Saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		220.242.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan</i>	-			11 %	52.714.900,00						-	150.000.000,00	
		[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5 6 9	12 6	11 11,5 6	10 11 5	52.714.900,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait</i>	-			50 %	2.838.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningka tan Pereko nomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	2.838.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan</i>	-			20 %	49.876.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	12.600.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>				1 Dokumen	33.205.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	4.071.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningka tan Pereko nomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan</i>	-			82 %	50.988.475,00						-	100.000.000,00	
		[Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan]	<i>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan</i>	85 85,3	78	80 85	82 85,1	50.988.475,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan</i>	-			20 %	50.988.475,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	21.022.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	29.965.875,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
J U M L A H								3.157.251.426,00							3.749.123.908,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 merupakan rangkuman rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan ketahanan pangan. Mengingat masalah ketahanan pangan bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah.

Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian –penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Selain itu, ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur perlu sekali ditingkatkan baik mutu dan jumlahnya. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur (keahlian dan keterampilan) sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan. Namun demikian apabila terjadi ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja, maka program/kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan harus ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Membangun terus kemitraan dengan semua stakeholder merupakan kunci keberhasilan pembangunan Pangan. Pembangunan pangan tidak dapat dilaksanakan oleh satu Perangkat Daerah saja melainkan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan/berkelanjutan.

Pangan merupakan pembangunan bidang hilir dari proses produksi yang dilaksanakan oleh pertanian, perkebunan. Ketahanan pangan merupakan bidang pembangunan yang dilaksanakan pasca produksi sampai dengan hasil produksi siap dikonsumsi.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026 memperhatikan kaidah-kaidah :


1. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
2. Masalah dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan yang dikehendaki.
4. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
5. Memperhatikan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
6. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 merupakan ringkasan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan ketahanan pangan Kota Payakumbuh. Mengingat masalah pangan dan gizi bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah.

Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

Payakumbuh, 4 September 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Ketersediaan pangan utama	19.790 ton
2. Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan.	1. PoU (Prevalence of Undernourishment)	5,54
	2. Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi
2. Mewujudkan stabilisasi harga pangan	1. Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤25%
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	80,85

Payakumbuh, 4 September 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



EDVIDEL ARDA, S.IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOLOM 1 Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	KOLOM 2 Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	KOLOM 3			KOLOM 4		KOLOM 5		KOLOM 6		KOLOM 7		KOLOM 8		KOLOM 9	
		Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengkukuran Hasil		Pengkukuran Hasil		Pengkukuran Hasil		Pengkukuran Hasil		Pengkukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender								
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)								
Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Pemerintah berusaha menekan konsumsi beras dan terigu dengan mengeluarkan PP no 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 2) Masih rendahnya konsumsi olahan pangan lokal 3) Peraturan Presiden No 22 Thn 2009 tentang kebijakan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 4) Permentan No 43 Thn 2009 tentang Gerakan percepatan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 5) Masih rendahnya konsumsi olahan pangan lokal dilihat dari Data PPH Konsumsi 2023 konsumsi pangan lokal umbi-umbian 36 gr perkapita/hari dari yang seharusnya 126 gr/kapita/hari	1). Dari aspek akses - pengolahan pangan lokal kurang diminati oleh kaum pria, wanita sudah ada mengolah pangan lokal - akses tidak terlalu berpengaruh karena pangan lokal sangat mudah diakses bagi kaum pria ataupun wanita 2). Partisipasi keaktifan kaum laki-laki dalam hal ini masih terbatas dikarenakan kaum laki-laki merasa kegiatan ini merupakan pekerjaan perempuan 3). Dari aspek Kontrol keterbatasan kaum pria dalam kegiatan ini mengakibatkan kontrol mereka terhadap kegiatan ini sangat terbatas, kecuali cheff pria. 4). Dari aspek Manfaat, tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat.	1). Masih belum mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan 2). Pelatihan yang diadakan hanya untuk anggota PKK, KWT dan Dasawisma (kaum wanita) 3. Belum tersedianya data pilah gender	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Laki-laki masih kurang keikutsertaan dalam pengolahan pangan lokal	A) Tujuan : *) Meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam mengolah pangan lokal B) Aktifitas : *) Melakukan pembinaan terhadap KWT dan Dasawisma dan PKK *) Melaksanakan pelatihan dan lomba pengolahan pangan lokal	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu, Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Aktivitas 1 : Melakukan pelatihan pangan lokal non beras non terigu Aktivitas 2 : Melaksanakan Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman 3 : Melaksanakan sosialisai konsumsi pangan lokal	Input : PKK, KWT dan Dasawisma Output : Meningkatnya pengetahuan anggota PKK, KWT dan Dasawisma Outcomes : Meningkatnya kreatifitas dalam pengolahan pangan lokal	Input : Dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 165.608.500,- Panitia pelaksana dari Dinas Ketahanan Pangan , peserta pelatihan pangan lokal non beras non terigu sebanyak 75 orang, peserta sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman sebanyak 30 orang, peserta sosialisasi konsumsi pangan lokal sebanyak 30 orang Out put : Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Out comes : Meningkatnya keanekaragaman pangan lokal yang diolah masyarakat hingga bernilai ekonomi .								
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan kemampuan PKK, KWT/Masyarakat dalam mengkreasikan olahan pangan lokal																

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP) ; Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)

Payakumbuh, 22 April 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



EDVIDEL ARDA, S.IP, MM
Nip. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan Gender (Data Pilah)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Pengawasan Keamanan Pangan	Masih ditemukan pangan yang belum aman untuk dikonsumsi pada cabe. Dari data uji logam berat pada 20 beras yang dibeli ditempat yang berbeda ada kandungan logam berat tetapi dibawah batas maksimal (residu)	1). Dari aspek akses Karena terkait pangan di Rumah Tangga, lebih dominan ibu Rumah Tangga dibanding laki-laki kecuali single parents 2). Dari aspek Kontrol aspek ini dilakukan oleh Dinas dengan uji labor bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki 3). Dari aspek Manfaat kegiatan ini memberikan manfaat yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat 4).Aspek peran laki-laki dan perempuan. Dominan peran perempuan karena terkait pangan di Rumah Tangga	1). Kemampuan uji labor terhadap pangan Rumah Tangga dengan test kit masih terbatas 2) belum memiliki labor 3) Kita belum memiliki SDM laki-laki dan perempuan untuk Analisis Laboratorium	1).Terkait pangan perlu Temu Teknis dengan stakeholder 2). Perlu pembinaan pada produsen pangan segar 3) Produsen tidak patuh terhadap SOP dalam penanggulangan penyakit	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Temu Teknis penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Input : Stakeholder terkait keamanan pangan Output : - Hasil uji labor pestisida dan logam berat - Temu teknis Outcomes : Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	In put : Dana yang dibutuhkan sebanyak Rp.36.539.750 masyarakat yang mengikuti temu teknis Out put : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Out comes : Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan
Sub Kegiatan : Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan								
Tujuan : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar						Aktivitas 1 : Pengambilan sampel sayur buah untuk uji pestisida 2. Pengambilan sampel beras untuk uji logam berat 3. Melaksanakan temu teknis 2x setahun setelah pengambilan sampel dan uji labor selesai		

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP); Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)

Payakumbuh, 22 April 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP, MM
Nip. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER BUDGET STATEMENT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2026

Program	Pengawasan Keamanan Pangan		
Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
Kode kegiatan	2.09.05.2.01.01		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none">Kota Payakumbuh merupakan daerah penghasil komoditi pangan yang cukup seperti beras, sayur-sayuran,daging,ikan tetapi dalam konsumsi masih jauh dari target.Pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat.Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bahteri dan lain-lain. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian GenderKarena terkait pangan di Rumah Tangga, lebih dominan ibu Rumah Tangga dibanding laki-laki yang peduli terhadap keamanan pangan		
Rencana Tindak	Kegiatan	Melaksanakan Temu Teknis Penguatan Kelembagaan, Pengujian sample pangan segar dan Menyebarkan media komunikasi Informasi dan edukasi	
	Tujuan	Meningkatkan/menguatkan kelembagaan keamanan pangan	
	Aktivitas 1	Temu Teknis Penguatan Kelembagaan	
	Aktivitas 2	Pengujian sampel pangan segar	
	Sumber Daya/Input	Masyarakat yang mengikuti temu teknis	
Output	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 36.539.750,-	
	SDM	Masyarakat Kota Payakumbuh yang mengikuti temu teknis	
Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar		

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S. IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER BUDGET STATEMENT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2026

Program	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
Kegiatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Kode kegiatan	2.2.09.03.2.04.02		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Melalui kegiatan ini dilakukan beberapa upaya diversifikasi pangan, dimulai dari pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan saja, sampai dengan aspek pengolahan, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi sebagai upaya untuk pengembangan sumberdaya masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender- Kegiatan hanya difokuskan pada KWT, PKK dan Dasawisma (kaum wanita)- Kurangnya minat kaum pria pada kegiatan ini		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu, Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal serta Gelar Pangan lokal	
	Tujuan	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengkreasikan olahan pangan lokal non beras non terigu sehingga menjadi makanan yang bernilai, lezat, bergizi, bersaing dan diminati oleh anak-anak dan masyarakat	
	Aktivitas 1	Pelatihan keterampilan anggota KWT dan Dasawisma dan KWT untuk mengkreasikan olahan pangan lokal non beras non terigu	
	Aktivitas 2	Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	
	Aktivitas 3	Pelatihan pengolahan pangan lokal	
	Aktivitas 4	Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal	
	Sumber Daya/Input	a. Modul Pelatihan Keterampilan b. KWT, Dasawisma, TP PKK c. Narasumber	
	Output	a. 1 Modul Pelatihan Per Orang b. Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anggota KWT, PKK dan Dasawisma	
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 165.608.500,-	
	SDM	Anggota PKK, Anggota KWT dan Dasawisma, Kader masyarakat, Kepala Sekolah / tenaga pendidik serta siswa SD, SMP dan SMA	
Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatnya keanekaragaman pangan lokal yang diolah masyarakat hingga bernilai ekonomi .		

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S. IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001

